



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

REVIU RENSTRA TAHUN 2025

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BITUNG



Lokasi

📍 Jalan Tandurusa, Kelurahan
Aertembaga Dua, Kecamatan
Aertembaga, Kota Bitung - Provinsi
Sulawesi Utara

Hubungi Kami

📱 bppsdm_bpppbitung
📺 bppsdm_bpppbitung
📧 sekretariat@bpppbitung.com



BerAKHLAK



Bab I

Informasi Umum

1.1 Ringkasan

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Indonesia juga memiliki keunggulan demografis dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa serta 12.968 desa yang memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan. Pengelolaan potensi demografis secara optimal akan memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendampingan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan terdapat 3.828.594 pelaku usaha disektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas 1,8 juta pelaku usaha perikanan, 950 ribu pembudidaya ikan, dan 984 ribu nelayan tangkap. Potensi tersebut menjadi modal dasar bagi bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, serta tangguh dalam politik, keamanan, sosial, dan budaya bahari. Aspirasi besar ini selaras dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Sektor kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran tersebut tercermin pada sasaran pembangunan RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat daya saing bangsa.

Perekonomian nasional diarahkan untuk tumbuh melalui sektor kelautan dan perikanan sebagai engine of growth. Produktivitas hasil perikanan ditingkatkan, sumber pertumbuhan baru dioptimalkan, dan nilai tambah diciptakan sehingga memberikan multiplier effect yang luas. Agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menjangkau nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar, serta masyarakat pesisir yang rentan terhadap bencana iklim. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan peran SDM yang inovatif, kompeten dan

berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, vokasi, dan penyuluhan yang sesuai kebutuhan industri, diperkuat dengan standardisasi serta sertifikasi kompetensi agar SDM kelautan dan perikanan dan pelaku usaha memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap teknologi, serta relevan dengan tuntutan pasar kerja. Paradigma lama yang menitikberatkan pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan.

Landasan pembangunan baru berorientasi pada ekonomi biru dengan prinsip ekologi sebagai panglima serta penyiapan SDM inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pendekatan ini menekankan pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta penggunaan teknologi yang terukur, efisien, dan bertanggung jawab. Paradigma ekonomi biru diwujudkan melalui lima kebijakan utama: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona; (3) pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pengurangan sampah plastik laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing untuk mensukseskan kebijakan Blue Economy KKP.

Renstra BPPSDM KP 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis jangka menengah yang bersifat indikatif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penyusunan dimulai dengan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, dilanjutkan dengan analisis potensi dan permasalahan, serta telaah lingkungan strategis nasional maupun global. Hasilnya diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta mengoptimalkan peran SDM kelautan dan perikanan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Reviu Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2025-2029 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang didalam konsepnya disebut sebagai evaluasi on-going atau proses evaluasi pada periode perencanaan tahun berjalan. Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formulasi yang menelaah sejauh mana formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional. Reviu terhadap Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap target-target kinerja yang mengikuti kebijakan yang ada di BPPSDMKP.

Namun demikian ada satu kaidah khusus yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Rencana Strategis K/L sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 bahwa setiap K/L sangat diharapkan untuk tidak melakukan perubahan Renstra K/L yang telah ditetapkan. Perubahan atau revisi Renstra K/L berjalan dapat dilakukan sepanjang: a) Terdapat UU yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau b) Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L; c) Perubahan Renstra K/L tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Reviu

Dasar hukum pelaksanaan Reviu Renstra BPPP Bitung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2019, tentang pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, 1995);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan,
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011, tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan,
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029;
- k. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Per-BPPSDM/2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029.

1.3 Tujuan Reviu

Tujuan dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPPP Bitung Tahun 2025 – 2029 adalah melakukan penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2025 - 2029 terhadap perubahan dinamika kebijakan strategis pada lingkup nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPPSDM KP.

1.4 Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup atas Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPPP Bitung Tahun 2025 - 2029 mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPPP Bitung, meliputi:

- a. Target Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 – 2029;
- b. Target Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025;
- c. Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2024;
- d. Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025;

Bab II

Uraian Hasil Reviu

2.1 Target Kinerja BPPP Bitung 2025 – 2029

Target Kinerja BPPP Bitung periode 2025–2029 merupakan manifestasi strategis dari Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP yang berfokus pada transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang unggul, adaptif, dan inovatif. Adapun target kinerja BPPP Bitung 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RANCANGAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (%)	%	75	76	77	78	79
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	Orang	2.437	3.599	3.824	3.969	4.232
3	Nilai PNBPN Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	Rupiah miliar	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
4	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Bitung (Unit)	Unit	-	1	1	1	1
5	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	%	100	100	100	100	100
6	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	Indeks	83	83	83	83	83
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	%	85	86	87	88	89
8	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	%	80	81	82	83	84
10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	%	80	81	82	83	84
11	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	Nilai	92	92	92	92	92
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	Nilai	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
13	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	Kelompok	2.998	3.294	3.639	3.992	4.353
14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	Kelompok	80	92	101	112	121
15	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	Kelompok	296	345	353	361	369
16	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	unit	27	90	126	162	198
17	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	paket	1	1	1	1	1
18	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	Orang	-	17	26	35	43
19	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	orang	8	8	8	8	8

2.2 Target Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025

Target Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 merupakan manifestasi strategis dari Rencana Kegiatan dan Target Kinerja BPPP Bitung periode Tahun 2025 – 2029. Adapun target kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025	
			Target awal	Revisi I
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (%)	%	1.713 (orang)	75%
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	Orang	2.437	400,00
3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	Rupiah miliar	0,18	0,189
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	orang	30	-
5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	unit	1	-
6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	%	100,00	100,00
7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	Indeks	83,00	83,00
8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	%	85,00	85,00
9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	Nilai	80,00	80,00
10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	%	80,00	80,00
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	%	80,00	80,00
12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	Nilai	92,00	92,00
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	Nilai	71,50	71,50
14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	Kelompok	2.998	2530
15	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	Kelompok	80	80
16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	Kelompok	296	289
17	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	unit	27	27
18	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	paket	1	1
19	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	Orang	-	4
20	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	orang	8	8

2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Bitung Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). BPPP Bitung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Refleksi Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2024		
			TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	%	72	75,06	104,25
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (Orang)	Orang	2.901	2936	101,21
3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	Rupiah miliar	0,19	0,58	304,74
4	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Bitung untuk percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	Kawasan	2,00	2,00	100,00
5	Tenaga Kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Bitung (orang)	Orang	16	21	131,25
6	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	Orang	150	150	100,00
7	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	Orang	18	27	150,00
8	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	Unit	1	1	100,00
9	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	Unit	1	1	100,00
10	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	%	100	100	100,00
11	Unit Kerja BPPP Bitung yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	Satker	1	1	100,00
12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)	Nilai	94	98,48	104,77
13	Persentase unit kerja BPPP Bitung yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	%	94	120,14	127,81
14	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	Indeks	81	82,99	102,46
15	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%)	%	≤ 0,5	0	120,00
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	%	82	100	121,95
17	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPPP Bitung (Unit)	Unit	1	1	100,00
18	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	Nilai	78	83,15	106,60
19	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	nilai	93,76	100	106,66
20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (Nilai)	Nilai	71	100,00	140,85
21	Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Bitung (Orang)	Orang	2	3	150,00
22	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (Kelompok)	Kelompok	3.450	3476	100,75
23	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (Kelompok)	Kelompok	190	190	100,00
24	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (Kelompok)	Kelompok	390	396	101,54
25	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Bitung (Orang)	Orang	1061	1061	100,00
26	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha di BPPP Bitung (Kelompok)	kelompok	10	11	110,00

2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Bitung Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). BPPP Bitung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Refleksi Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (orang)	%	75%	75,16%	100,21
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	Orang	400,00	475,00	118,75
3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	Rupiah miliar	0,189	0,23	120,00
4	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	%	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	Indeks	83,00	83,82	100,99
6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	%	85,00	85,00	100,00
7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	Nilai	80,00	83,15	103,94
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	%	80,00	95,00	118,75
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	%	80,00	100,00	120,00
10	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	nilai	92,00	97,60	106,09
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	nilai	71,50	100,00	120,00
12	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	kelompok	2530	3000	120,00
13	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	kelompok	80	110	120,00
14	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	kelompok	289	339	117,30
15	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	Unit	27	28	103,70
16	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (paket)	paket	1	1	100,00
17	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	Orang	4	4	100,00
18	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	orang	8	10	120,00

Bab III

Penutup

Seluruh perubahan yang tertuang dalam reviu Rencana Strategis BPPP Bitung periode 2025–2029 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari dokumen induk Renstra. Dokumen ini disusun sebagai instrumen fundamental serta pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan program, inovasi kegiatan, dan optimalisasi anggaran demi mencapai target kinerja organisasi di sepanjang periode 2025–2029

Bitung, 19 Januari 2026

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. 19801225 200502 2 001